

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah mengalami dinamika dalam perjalanan demokrasi dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan. Era reformasi menjadi tonggak penting yang membawa transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, politik, hingga sosial budaya. Sejak reformasi bergulir, terjadi perubahan struktur di berbagai bidang yang berdampak signifikan pada tatanan politik di tanah air. Beragam perubahan sistem ini turut memengaruhi lanskap politik, baik di tingkat pemerintahan pusat maupun daerah. Dorongan untuk memperbaiki sistem politik terus dilakukan dengan menekankan prinsip transparansi dan keterbukaan, yang menjadi inti dari proses demokratisasi. Tujuan utamanya adalah menciptakan keseimbangan politik yang lebih baik demi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara (Anshori, Akhyar, dkk, 2021)

Sejak zaman dahulu Indonesia telah menerapkan konsep demokrasi meskipun hanya lingkup kecil seperti desa (demokrasi desa) hal ini tercermin dari adanya pemilihan Kepala Desa (Kades) dan musyawarah di tingkat desa. Terdapat lima ciri utama diadakannya pemilihan Kepala Desa tersebut yaitu diadakannya rapat, pengambilan keputusan berdasarkan gotong royong, hak untuk menyampaikan pendapat atau keberatan, serta adanya kebebasan untuk berbeda pendapat tanpa dominasi dari penguasa yang absolut, dengan pendekatan yang sesuai konteks. Kemudian lahirlah sebuah regulasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, pemerintah Indonesia juga menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur tentang tata cara pemilihan kepala Desa (Anshori, Akhyar, dkk, 2021)

Demokrasi bisa dikatakan suatu istilah yang ada pada sistem politik dimana jiwanya adalah kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat diartikan dengan istilah demokrasi yang terdiri dari 2 (dua) perkataan, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *cratein* yang memiliki arti pemerintah (Miriam Budiardjo, 2008).

Penjelasan Soehino tentang akibat diselenggarakannya ajaran kedaulatan rakyat berakar pada pandangan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat sebagai hasil dari kesepakatan bersama dalam perjanjian masyarakat. Menurutnya, ada dua akibat utama dari pelaksanaan ajaran ini: 1) Terciptanya Kemauan Umum (*Volonté Générale*), Kemauan umum ini disebut sebagai kedaulatan, yaitu kekuasaan tertinggi yang lahir dari rakyat itu sendiri. 2) Terciptanya Masyarakat (*Gemeinschaft*), Masyarakat ini bukan sekadar kumpulan individu, tetapi sebuah kesatuan yang memiliki identitas dan kemauan bersama. Suatu keinginan untuk bersatu dengan mereka secara politis dalam suatu negara dan kesiapan untuk terikat pada tindakan politik bersama (Lukes, 1986)

Indikator negara demokrasi yaitu adanya Pemilu bahkan bisa dikatakan tidak ada satupun negara yang mengklaim dirinya demokratis tanpa melaksanakan pemilu sekalipun negara itu pada hakekatnya adalah otoriter. Ketika perspektif *Schumpeterian* tentang demokrasi mengatakan demokrasi sebagai ‘metode politik’ mendominasi teorisasi demokrasi maka pemilu menjadi elemen paling penting dari ukuran negara demokrasi. Bahkan Pezeworski dan rekan-rekannya mendefinisikan demokrasi sebagai “sekedar rezim yang menyelenggarakan pemilihan-pemilihan umum untuk mengisi jabatan-jabatan pemerintahan” (dengan ketentuan bahwa persaingan yang sebenarnya mensyaratkan adanya oposisi yang memiliki kesempatan memenangkan jabatan publik, serta bahwa posisi kepala eksekutif dan kursi legislatif diisi melalui pemilu (Przeworski, A., & Limongi, F, 1997). Soedarsono menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum bisa dikatakan sebagai syarat minimal adanya demokrasi dan diselenggarakan dengan tujuan memilih wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis (Soedarsono., 2004)

Pemilihan umum menjadi sarana demokrasi yang dalam pengimplementasiannya berkedaulatan rakyat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui pemilihan yang dilakukan oleh rakyat dapat memilih pemimpin yang diharapkan nantinya mampu membawa perubahan kearah yang lebih baik. Pemilu juga sebuah sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang dipercaya guna

menyelenggarakan berbagai urusan- urusan pemerintahan. Urusan - urusan pemerintahan tersebut bisa berbentuk membuat suatu kebijakan, mengontrol pelaksanaan kebijakan, ataupun memilih pemimpin dalam pemerintahan. Pemilihan wakil-wakil tersebut bertujuan untuk memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan Politik tertentu di dalam sebuah kekuasaan seperti Presiden/Wakil Presiden, DPR Pusat/Daerah, DPD dan Kepala Daerah. Pada umumnya suatu Pemilu menganut asas langsung, umum, bebas dan rahasia, dengan teknis pelaksanaannya itu sendiri harus jujur dan adil. Disamping itu Pemilu juga harus didasarkan kepada kesadaran rakyat untuk ikut serta memilih, jangan karena paksaan atau karena tekanan. Semakin tinggi tingkat partisipasi rakyat dalam Pemilu, maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran Politik mereka.

Pada tahun 2019, Indonesia melaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil presiden untuk periode 2019-2024. Pelaksanaan pemilihan Presiden ini didasarkan pada UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (Pemilu), yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam suatu jabatan yang sama, hanya dalam satu kali masa jabatan.

Pesta demokrasi yang berlangsung di Indonesia dimulai dari mulai pemilihan Presiden dan wakil Presiden, pilkada, dan pemilu legislatif secara langsung merupakan gambaran dari berjalannya suatu sistem demokrasi di negara ini. Meskipun demikian proses demokrasi yang selama ini belum sepenuhnya menggambarkan masyarakat paham akan arti dari pada demokrasi. Masyarakat desa yang rata-rata masih berpendidikan rendah memahami politik hanya sebatas pesta rakyat yang dilakukan setiap lima tahun, dan tidak sedikit partisipasi juga politik yang dilakukan oleh masyarakat masih dipengaruhi oleh adanya suatu gerakan-gerakan dari pihak-pihak yang berkuasa termasuk kepala desa.

Selain sebagai suatu proses pengisian jabatan didalam pemerintahan, pemilihan umum juga menjadi sarana pelaksanaan untuk kedaulatan rakyat, yang tertuang dalam UUD 1945 pasal (1) ayat (2) yang menyatakan bahwa "*kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar*". Sehingga dapat dipahami bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat,

maka rakyat memiliki kewenangan dalam memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk menjalankan pemerintahan, melalui pemilihan umum (Pemilu) (Salim, Rahmad Fauzi, 2008). Oleh karena itu, pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam pemilihan umum yang tercantum didalam UUD 1945 berlangsung secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER & JURDIL), dimana suatu pemilu dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat dengan tidak adanya keterpaksaan dari pihak manapun serta mengikuti aturan- aturan yang berlaku. Artinya, partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dalam keberhasilan berlangsungnya pemilu.

Partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama (Ach. Wazir, W. S., dkk. , 1999). Menurut Ramlan Surbakti partisipasi politik merupakan keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Sementara partisipasi politik sebagai usaha terorganisir oleh para warga negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijaksanaan umum saha ini dilakukan berdasarkan kesadaran akan tanggung jawab mereka terhadap kehidupan bersama sebagai suatu bangsa dalam suatu negara (Surbakti, R, 1999).

Bentuk-bentuk dari partisipasi menurut Sundariningrum dibagi menjadi 2 (dua) diantaranya: a) Partisipasi langsung, partisipasi langsung terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. b) Partisipasi tidak langsung, bentuk partisipasi tidak langsung ini adalah ketika individu mendelagasikan hak partisipasinya kepada orang lain (Sundariningrum, 2001).

Keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan umum juga tidak terlepas dari peranan pemerintah untuk menghimbau masyarakat supaya untuk turut berpartisipasi dalam pemilihan umum, terutama di wilayah desa. Peranan pemerintah desa menjadi hal yang penting dalam memberikan penjelasan, pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pemilu. Hal ini

dilakukan agar masyarakat paham betul mengenai pemilihan umum sehingga tercipta nya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam pemilihan umum dan terciptanya suatu demokrasi yang baik yang dimulai dari Desa.

Miniatur dari pemerintahan negara yaitu pemerintahan desa dimana masyarakatnya masih menjunjung tinggi sifat kekeluargaan dan gotong royong. Sehingga pemerintah mempunyai perhatian khusus terhadap pemerintahan desa terbukti atas disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan mempunyai paradigma baru bahwa perubahan baik ekonomi, pembangunan, dan kebijakan politik bukan hanya dari kota saja, akan tetapi membangun Indonesia harus mulai dari Desa.

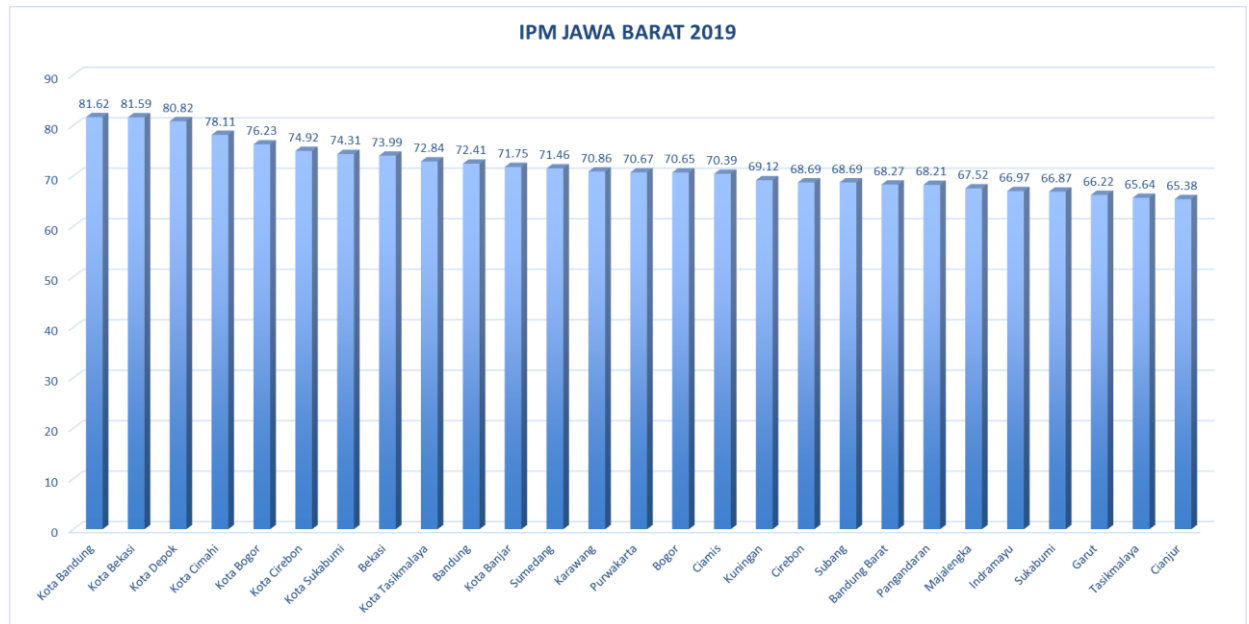
Salah satu provinsi yang mayoritas penduduknya paling banyak dan disebut juga suatu provinsi atau wilayah bagian dari Indonesia dengan Ibukotanya Kota Bandung yaitu Provinsi Jawa Barat yang bisa dikatakan suatu wilayah yang menjadi penentu dalam suatu kontestasi politik pemilu dalam meraup suara dengan jumlah penduduk terpadat kurang lebih di isi oleh 50 juta penduduk dengan 27 Kota/Kabupaten yang tersebar.

Di Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 27 Kota/Kabupaten yang tersebar ada salah satu Kabupaten yang memiliki tingkat Partisipasi Pemilih yang rendah Kabupaten tersebut yaitu Kabupaten Cianjur. Kabupaten Cianjur sendiri merupakan suatu sebuah wilayah kabupaten yang terletak di bagian barat dan selatan provinsi Jawa Barat Indonesia dan ibu kotanya berada di kecamatan Cianjur. Kabupaten Cianjur memiliki luas wilayah 361.434,98 Ha dengan jumlah 32 Kecamatan dan 6 Kelurahan dan 354 Desa. Kabupaten dikatakan juga sebagai kabupaten terluas kedua di Pulau Jawa setelah Kabupaten Sukabumi. Partisipasi rendah yang dialami oleh Kabupaten Cianjur bukan terjadi karena adanya kesengajaan namun ini merupakan antusiasme keikutsertaan masyarakat yang kurang baik dengan beberapa alasan yang terjadi di masyarakat salah satunya rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berada di Kabupaten Cianjur. Perhatian peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) harus menjadi tujuan sebagai modal dalam meningkatkan kualitas masyarakat kabupaten Cianjur baik dari sector Pendidikan, Kesehatan, dan Standar hidup Masyarakatnya.

Berikut merupakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat mengenai data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 27 Kabupaten yang berada di Jawa Barat sebagai berikut :

Gambar 1. 1

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019



Sumber: (Statistik, 2019)

Indeks pembangunan manusia (IPM) yaitu sebuah indikator yang menunjukkan pengembangan terutama dalam pembangunan sumber daya manusianya. Dalam bidang pendidikan pengetahuan (knowledge) dianggap sebagai unsur mendasar dari pembangunan manusia. Pengetahuan sebagai indikator diukur berdasarkan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.

Berdasarkan data diatas dari 27 Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cianjur menempati peringkat ke-27 atau peringkat terakhir Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan jumlah nilai 65.38 % .

Hal ini membuktikan bahwasanya kualitas Pendidikan yang menjadi salah satu peningkatan IPM di Kabupaten Cianjur sangat rendah mengacu pula pada rendahnya partisipasi masyarakat Kabupaten Cianjur yang ikut berpartisipasi terhadap adanya pemilihan umum. Jadi, tidak hanya mempertimbangkan aspek pembangunan infrastrukturnya saja namun harus menghitung dan menilai

pembangunan manusianya. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan meraih kemakmuran di Kabupaten Cianjur.

Dari hal demikian kita melihat dari salah satu Kecamatan di Kabupaten Cianjur yaitu Kecamatan Campaka. Kecamatan Campaka yaitu sebuah wilayah dari Kabupaten Cianjur yang menaungi 11 Desa. Desa bisa dikatakan sebagai ujung tombak dari pemerintahan terkecil karena berhubungan langsung dengan masyarakat.

Masyarakat desa yang berpendidikan rendah cenderung memahami politik secara sederhana hanya sebatas “pesta rakyat” setiap lima tahun, kondisi ini dapat melemahkan demokrasi substantif karena suara rakyat yang tidak maksimal. Hal ini menunjukkan pentingnya pendidikan politik dan pemberdayaan masyarakat desa agar mereka bisa memahami hak dan peran politiknya secara lebih sadar dan mandiri.

Berdasarkan kondisi masyarakat pedesaan diatas yang berpendidikan masih cukup rendah dan mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, maka peran kepala desa menjadi sangat penting sekali. Hal inipun yang digambarkan di Desa yang berada di Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 1

Tingkat Pendidikan Kecamatan Campaka Tahun 2019

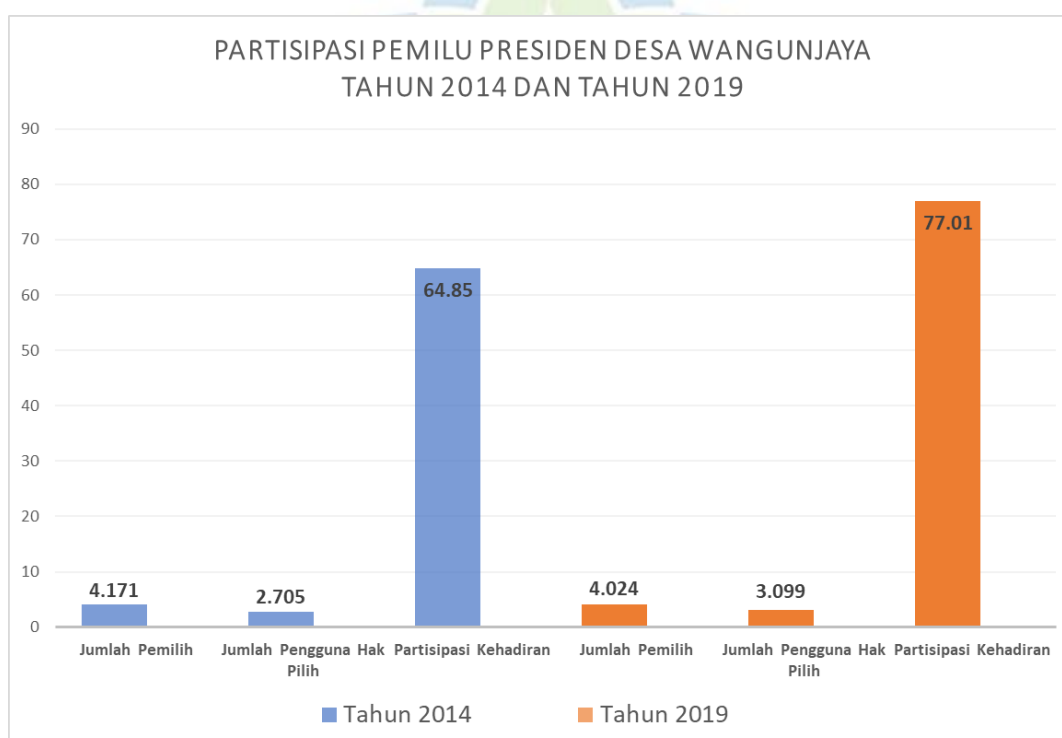
NO	NAMA DESA	JENJANG										TOTAL
		BELUM SEKOLAH	SD	SLTP	SLTA	D2	D3	S1	S2	S3	DO	
1	SUKAJADI	586	3867	856	681		16	19	4			6029
2	KARYAMUKTI	459	3554	720	676	6	9	23	3			5450
3	CIDADAP	453	4052	795	882		19	32	6			6239
4	GIRIMUKTI	602	3579	696	543		10	20	4			5454
5	SUKADANA	499	3610	679	743		13	25	4			5573
6	WANGUNJAYA	481	3643	761	526	2	8	18	2			5441
7	GIRIMUKTI	584	3755	731	549		9	23	3			5654
8	CIMENTENG	491	3756	703	602		11	19	4			5586
9	MARGALUYU	492	3782	673	531		9	22	3			5512
10	CAMPAKA	565	3792	681	651		12	20	4			5725
11	SUSUKAN	671	4022	773	792	7	18	22	6			6311
JUMLAH		5883	41412	8068	7176	15	134	243	43	0	0	62974

Sumber: (Dokumentasi Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur)

Berdasarkan pada data diatas, lebih lanjut diuraikan bahwa masyarakat yang

berpendidikan di Kecamatan Campaka Belum Sekolah 5.883 orang, tamatan SD paling Banyak yaitu 41.412 orang, tamatan SMP sekitar 8.068 orang, tamatan SMA 7.176 orang, D2 sampai S1 392 orang dan S2 berjumlah 43 orang. Jika dilihat dari data diatas Desa Wangunjaya berada pada tingkatan terendah diantara sebelas desa di Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur dengan jumlah Pendidikan Belum Sekolah 481 orang, tamatan SD paling Banyak yaitu 3.643 orang, tamatan SMP sekitar 761 orang, tamatan SMA 526 orang, D2 sampai S1 28 orang dan S2 berjumlah 2 orang. Adapun data warga yang ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum tahun 2014 dan 2019 di Desa wangunjaya dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 1. 2
Perbandingan partisipasi PEMILU 2014 dan 2019 di Desa Wangunjaya



Sumber: (KPU Kabupaten Cianjur)

Berdasarkan tabel diatas, memberikan pemahaman bahwa di Desa Wangunjaya dalam partisipasi Pemilu Presiden pada tahun 2014 ada sekitar 4.171 Jumlah Pemilih dan sekitar 2.705 umlah Pengguna Hak Pilih. Sedangkan pada tahun 2019 ada sekitar 4.024 Jumlah Pemilih dan sekitar 3.009 jumlah Pengguna Hak Pilih, sehingga partisipasi kehadiran pemilih pada tahun 2019 memperoleh

peningkatan 12,16 % dari yang asalnya pada tahun 2014 sekitar 64.85 % sedangkan pada tahun 2019 sekitar 77.01 % meningkat dari Pemilu Presiden sebelumnya.

Adapun 10 Misi yang digagas oleh Kepala Desa Wangunjaya yang menjadi Program dalam melaksanakan pemerintahannya. Dari 10 misi tersebut ada 1 misi yang berhubungan dengan peningkatan partisi politik dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 1. 3

Misi Kepala Desa Wangunjaya



Dari Misi diatas di Program Kepala Desa Wangunjaya berupa meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Sosial, Politik, Saling menghormati

dalam kehidupan berbudaya bermasyarakat di Desa Wangunjaya. Dalam hal ini kepala Desa Wangunjaya memiliki program yang berkaitan erat dengan peningkatan partisipasi politik masyarakat yang berada di wilayah Desa Wangunjaya.

Hal ini tidak terlepas dari partisipasi dari pemerintahan desa pula dalam meningkatkan partisipasi politik, aparat pemerintah desa berperan penting sebagai aktor utama dalam menggerakkan kebijakan pemerintah di tingkat desa, termasuk upaya mereka dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Desa sebagai unit administratif terkecil memiliki kedekatan yang lebih langsung dengan warganya, sehingga peran aparaturnya dalam menggalang partisipasi politik dapat menjadi kunci dalam menentukan hasil dan dinamika politik di tingkat nasional.

Permendagri No. 84 tahun 2015 pasal 6 ayat 3 d yang berbunyi “Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna”. Dalam hal ini Program kerja yang digagas oleh kepala Desa Wangunjaya sejalan dengan regulasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai tugas dan fungsi Kepala Desa. Yang dimana bahwasanya kepala desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintahan daerah. Pendidikan politik memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk generasi muda yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, aktif dalam partisipasi politik, serta mampu berpikir kritis terhadap informasi yang mereka terima.

Berdasarkan regulasi diatas dapat dipahami bahwa Kepala desa sebagai tokoh birokrat dengan kekuasaan tertinggi di tingkat desa. Perannya sangat vital dalam mengelola pemerintahan desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Diakui sebagai sosok yang sangat dihormati dan dianggap panutan, kepala desa tidak hanya sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai elit lokal yang berpengaruh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat desa. Dengan posisi dan pengaruhnya yang besar, kepala desa memiliki peran sentral dalam membentuk dan memimpin arah perkembangan serta kesatuan masyarakat desa menuju tujuan

bersama yang lebih baik.

Berdasarkan uraian pada pemaparan di atas, maka ketertarikan peneliti untuk mengkaji lebih lanjut yang dituangkan dalam judul **Peran Aparatur Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Umum Presiden tahun 2019 (Studi Kasus Desa Wangunjaya Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur).**

B. Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas agar tidak terlalu melebar pembasannya, maka peneliti menfokuskan kajian dengan membatasi pada beberapa aspek berikut:

1. Adanya Program Pendidikan Politik di Desa Wangunjaya yang belum optimal.
2. Partisipasi Masyarakat di desa Wangunjaya kecamatan Campaka pada tahun 2014 sampai 2019 mengalami peningkatan.
3. Adanya Keterlibatan Perangkat Desa di Desa Wangunjaya dalam Program Pendidikan Politik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan batasan masalah diatas, sehingga dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam Pemilu Presiden 2019 di Desa Wangunjaya?
2. Bagaimana peran Aparatur Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu Presiden 2019 di Desa Wangunjaya?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat Aparatur Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu Presiden 2019 di Desa Wangunjaya?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam Pemilu Presiden

2019 di Desa Wangunjaya.

2. Untuk mengetahui peran Aparatur Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu Presiden 2019 di Desa Wangunjaya.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Aparatur Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu Presiden 2019 di Desa Wangunjaya.

E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Selain tujuan-tujuan di atas, penulisan skripsi ini juga diharapkan memberikan manfaat dan Kegunaan untuk berbagai hal diantaranya:

- 1) Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan berupa sumbangan pemikiran atau wawasan keilmuan yang dikhususkan dalam bidang kajian ilmu sosiologi khususnya politik organisasi, politik pembangunan, dan politik desa kota yang dikhususkan dalam peranan kepemimpinan aparatur desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
- 2) Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:
 - a. Peneliti
 1. Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam bidang Ilmu Politik.
 2. Untuk menambah wawasan yang luas mengenai kondisi riil di masyarakat terutama mengenai penjelasan tentang peran pemerintah desa yang kaitannya erat dengan partisipasi politik masyarakat desa dalam melaksanakan pembangunan Desa
 - b. Pemerintah Desa
 1. Membantu aparatur desa dalam mencari solusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan memperbaiki kinerja aparatur desa dalam peranannya sebagai pemimpin masyarakat.
 2. Mengungkapkan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melaksanakan suatu pembangunan desa yang partisipatif sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat yang ada.

F. Kerangka Berfikir

Desa Wangunjaya dengan partisipasi masyarakat dalam PILPRES pada tahun 2014 sekitar 4.171 Jumlah Pemilih dan sekitar 2.705 jumlah Pengguna Hak Pilih pada tahun 2014 sedangkan pada tahun 2019 ada sekitar 4.024 Jumlah Pemilih dan sekitar 3.009 jumlah Pengguna Hak Pilih. Sehingga partisipasi kehadiran pada tahun 2019 memperoleh peningkatan yang baik di Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur.

Peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam PILPRES tersebut tidak terlepas dari peranan sosok kepala desa dalam membangunnya. Di desa Wangunjaya sendiri ada beberapa langkah strategis yang dilakukan dalam mengupayakannya salah satunya adalah melakukan sosialisasi yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat seperti ketua RT dan RW sebagai pemimpin lingkungannya. Mereka adalah ujung tombak yang sangat dekat dengan masyarakat, sehingga informasi dapat lebih mudah diterima dan dipahami oleh warga. Sosialisasi ini mencakup pentingnya hak suara, mekanisme pemilu, dan dampak partisipasi politik terhadap pembangunan desa.

Partisipasi politik ialah keterlibatan individu atau kelompok pada level terendah sampai tertinggi dalam sistem politik. Hal ini berarti bahwa partisipasi politik itu merupakan bentuk konkret dari kegiatan politik yang dapat mengabsahkan seseorang berperan serta dalam sistem politik. Dengan demikian maka setiap individu atau kelompok yang satu dengan yang lain akan memiliki perbedaan - perbedaan dalam partisipasi politik karena partisipasi menyangkut peran konkret dimana seseorang akan berbeda peranannya, strukturnya dan kehendak dari sistem politik yang di ikuti.

Herbert Mc.Closky berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui pengambilan bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan. Sedangkan menurut Ramlan Surbakti yang dimaksud dengan partisipasi politik itu ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Kemudian Miriam Budiardjo mendefinisikan juga terkait partisipasi

politik sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik dengan cara memilih kepala negara secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (Miriam Budiardjo, 2008)

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut mengenai definisi atau pengertian tentang partisipasi politik, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah bentuk dari keterlibatan rakyat dalam proses pemilihan wakil rakyat maupun kepala negara sebagai penyelenggara kegiatan pemerintahan dimana dalam kegiatan tersebut berkaitan erat sekali dengan kesejahteraannya.

Partisipasi politik dapat terwujud dalam berbagai bentuk yang secara umum diketahui bahwa bentuk partisipasi politik adalah secara langsung maupun tidak langsung. Samuel P. Huntington serta Joan Nelson menjelaskan tentang partisipasi politik yang ada di Indonesia bisa dengan dua cara: (1) Partisipasi politik otonom, merupakan sebuah partisipasi karena kesadaran sendiri. (2) Partisipasi politik karena adanya dorongan atau pengaruh dari luar (Huntington, S. P., & Nelson, J. M., 1990). Sedangkan menurut Andriyus terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam hal politik: a) Faktor Internal, merupakan Faktor yang berasal dari diri masyarakat itu sendiri yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik. Adapun faktor internal tersebut adalah: Tingkat Pendidikan, Tingkat Kehidupan Ekonomi dan kesadaran Politik. b) Faktor Eksternal, merupakan faktor yang berasal dari luar masyarakat yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat itu sendiri. Faktor-faktor eksternal tersebut antara lain yaitu peran pemerintah, peran partai politik, peran media masa dan perilaku calon legislatif (Andriyus, 2013)

Kaitannya dengan kepala desa sebagai pemimpin di Desa Wangunjaya sebagai sosok pemimpin, menurut Ordway Tead kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun menurut Yohannes Yahya kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut dengan penuh semangat berusaha mencapai tujuan (Yohannes Yahya, 2003).

Ada beberapa tipe kepemimpinan yang diutarakan oleh G.R Terry yaitu:

a. Kepemimpinan Pribadi

Dalam tipe ini pimpinan mengadakan hubungan langsung dengan bawahannya sehingga timbul hubungan pribadi yang baik.

b. Kepemimpinan Non-Pribadi

Dalam tipe ini hubungan langsung dengan bawahannya melalui perencanaan dan intruksi-intruksi tertulis.

c. Kepemimpinan Otoriter

Dalam tipe ini pimpinan melakukan hubungan dengan bawahannya dengan sewenang-wenang sehingga sebetulnya bawahannya melakukan sebuah perintah bukan karena tanggung jawab tetapi lebih karena rasa takut.

d. Kepemimpinan Kebapakan

Tipe kepemimpinan ini tidak memberikan tanggung jawab kepada bawahan untuk bisa mengambil keputusan sendiri karena selalu dibantu oleh pemimpinnya, hal ini berakibat kepada menumpuknya pekerjaan pemimpin karena segala permasalahan yang sulit akan dilimpahkan kepadanya.

e. Kepemimpinan demokratis

Kepemimpinan demokratis berorientasi pada manusia, dan memberikan bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya. Terdapat koordinasi pekerjaan pada semua bawahan, dengan penekanan terhadap tanggung jawab internal (pada diri sendiri) dan kerjasama yang baik. Kekuatan kepemimpinan demokratis ini bukan terletak pada “person atau individu pemimpin”, akan tetapi kekuatan justru terletak pada partisipasi aktif dari warga kelompok. Kepemimpinan demokratis menghargai potensi setiap individu, mau mendengar nasihat dan sugesti bawahan mengakui keahlian para spesialis dengan bidangnya masing-masing. Mampu memanfaatkan kapasitas setiap anggota seefektif mungkin pada saat-saat dan kondisi yang tepat

f. Kepemimpinan bakat

Pemimpin tipe ini memiliki kemampuan dalam mengajak orang lain, dan diikuti oleh orang lain. Para bawahan akan senang untuk mengikuti perintah yang diberikan karena pembawaannya yang menyenangkan.

Adapun sifat-sifat pemimpin Menurut Ordway Tead (Kartini Kartono, 1994) mengemukakan 10 sifat pemimpin yaitu sebagai berikut (Yasinda, 2017) :

- a. Energi Jasmaniah dan mental (physical and nervous energy) Hampir setiap pemimpin memiliki tenaga jasmani dan rohani yang luar biasa yaitu mempunyai daya tahan, keuletan, kekuatan atau tenaga yang istimewa yang tampaknya seperti tidak akan pernah habis. Hal ini ditanamkan dengan kekuatan mental berupa semangat juang, motivasi kerja, disiplin, kesabaran, keuletan, ketahanan batin, dan kemauan yang luar biasa untuk mengatasi semua permasalahan yang dihadapi
- b. Kesadaran akan tujuan dan arah (A sense of purpose and direction) Ia memiliki keyakinan yang teguh akan kebenaran dan kebenaran dan kegunaan dari semua perilaku yang dikerjakan, dia tau persis kemana arah yang akan ditujunya serta pasti memberikan kemanfaatan bagi diri sendiri maupun bagi kelompok yang dipimpinnya. Tujuan tersebut harus disadari benar, menarik dan sangat berguna bagi pemenuhan kebutuhan hidup bersama.
- c. Antusiasme (enthusiasm; semangat, kegairahan, kegembiraan yang besar) Pekerjaan yang dilakukan dan pekerjaan yang akan dicapai itu harus sehat, berarti, bernilai, memberikan harapan-harapan yang menyenangkan, memberikan sukses, dan menimbulkan semangat serta esprit de corps. Semua ini membangkitkan antusiasme, optimisme, dan semangat besar bagi pemimpin maupun para anggota kelompok.
- d. Keramahan dan kecintaan (friendliness and affection) Affection itu berarti kesayangan, kasih sayang, cinta, simpati yang tulus, disertai kesediaan berkorban bagi pribadi-pribadi yang disayangi. Sebab pemimpin ingin membuat mereka senang, bahagia dan sejahtera. Maka kasih sayang dan dedikasi pemimpin bisa menjadi tenaga penggerak yang positif untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan bagi semua pihak. Sedang keramah-ramahan ini mempunyai sifat mempengaruhi orang lain, keramahan juga memberikan pengaruh mengajak, dan kesediaan untuk menerima pengaruh pemimpin untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama, mencapai satu sasaran tertentu.
- e. Integritas (integrity, keutuhan, kejujuran, ketulusan hati) Pemimpin itu

harus bersifat terbuka; merasa utuh bersatu, sejiwa dan seperasaan dengan anak buahnya bahkan merasa senasib sepenanggungan dalam satu perjuangan yang sama. Karena itu dia bersedia memberikan pelayanan dan pengorbanan kepada para pengikutnya. Sedang kelompok yang dituntun menjadi semakin percaya dan semakin menghormati pimpinannya.

- f. **Pengusaan teknis (technical mastery)** Setiap pemimpin harus memiliki satu atau beberapa kemahiran teknis tertentu, agar ia mempunyai kewibawaan dan kekuasaan untuk memimpin kelompoknya. Dia menguasai pesawatpesawat mekanik tertentu, serta memiliki kemahiran-kemahiran sosial untuk memimpin dan memberikan tuntutan yang tepat serta bijaksana. Terutama teknik-teknik untuk mengkoordinasikan tenaga manusia, agar mencapai maksimalisasi efektivitas kerja dan produktivitasnya.
- g. **Ketegasan dalam pengambilan keputusan (devisiveness)** Pemimpin yang berhasil itu pasti dapat mengambil keputusan secara tepat, tegas dan cepat, sebagai hasil dari kearifan dan pengalamannya. Selanjutnya dia mampu meyakinkan para anggotanya akan kebenaran keputusannya.
- h. **Kecerdasan (intelligence)** Kecerdasan yang perlu dimiliki oleh setiap pemimpin itu merupakan kemampuan untuk melihat dan memahami dengan baik, mengerti sebab dan akibat kejadian, menemukan hal-hal yang krusial dan cepat menemukan cara penyelesaiannya dalam waktu singkat. Maka orang yang cerdas akan mampu mengatasi kesulitan yang dihadapi dalam waktu yang jauh lebih pendek dan dengan cara yang lebih efektif dari pada orang yang kurang cerdas.
- i. **Keterampilan mengajar (teaching skill)** Pemimpin yang baik itu adalah seorang guru pula, yang mampu menuntun, mendidik, mengarahkan, mendorong (memotivasi), dan menggerakkan anak buahnya untuk berbuat sesuatu. Disamping menuntun dan mendidik “muridnya”, dia diharapkan juga menjadi pelaksana eksekutif untuk mengadakan latihan-latihan, mengawasi pekerjaan rutin setiap hari, dan menilai gagal atau suksesnya satu proses atau treatment. Ringkasnya dia juga harus menjadi manager yang baik.
- j. **Kepercayaan (faith)** Keberhasilan pemimpin itu pada umumnya selalu didukung oleh kepercayaan anak buahnya. Yaitu kepercayaan bahwa para

anggota pasti dipimpin dengan baik, dipengaruhi secara positif, dan diarahkan pada sasaran-sasaran yang benar

Agar mudah memahami pada penelitian ini, maka dibuat alur penelitian sebagai berikut:

Gambar 1. 4
Bagan Kerangka Berfikir

